

Peninjauan Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Usaha Kecil dan Menengah

Dwi Urip Waryono¹, Rifka Novriani², Andi Vieska Ardhia Putri³,
Syifa Diana Putri⁴

^{1,2,3,4} Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

e-mail: dwiurip.staff.telkomuniversity.ac.id¹, rifkanvr@gmail.com²,
vieskaaaap@gmail.com³, syifadianaa@gmail.com⁴

Abstrak

Akuntansi umumnya didefinisikan sebagai seni atau ilmu yang berhubungan dengan pencatatan, penyajian, analisis, dan interpretasi data keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang menjadi perhatian akuntansi baik itu unit bisnis, keluarga, yayasan, unit pemerintah, atau ekonomi atau sektor apa pun adalah unit sosial dengan aspek keuangan. Akuntansi menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk masyarakat sebagai alat untuk informasi keuangan dan kontrol. Akuntansi keuangan merupakan sumber informasi yang paling penting bagi manajemen UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM memiliki pengetahuan manajemen pada dasarnya terbatas dan sedikit kemampuan kontrol dan keputusan dilakukan secara ad hoc. Dalam melakukan pencatatan, responden mengaku tengah mengalami kesulitan terkait metode pencatatan namun banyak terbantu oleh informasi yang diperoleh melalui internet. Lebih dalam lagi, responden yang juga berperan sebagai owner ini 60% diantaranya masih mengelola pencatatan sendiri dan belum memenuhi standar SAK EMKM. Pelaku usaha, UMKM, telah melakukan pencatatan yang dilakukan dengan tujuan pertama untuk mengetahui kondisi perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian.

Kata kunci: *Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Pelaporan Keuangan, UMKM, PSAK, EMKM.*

Abstract

Accounting is generally defined as the art or science dealing with recording, presenting, analyzing, and interpreting the financial data of a company. An enterprise of accounting concerns whether it is a business unit, a family, a foundation, a government unit, or the economy or any sector is a social unit with a financial aspect. Accounting provides a needed service to society as a tool for financial information and control. Financial accounting is the most important source of information for SME management. The results showed that SMEs have basically limited management knowledge and little control ability and decisions are made on an ad hoc basis. In recording, respondents admitted that they were experiencing difficulties related to the recording method but were helped a lot by information obtained through the internet. Going deeper, 60% of the respondents who also play the role of owner still manage their own records and do not meet SAK EMKM standards. Business actors, MSMEs, have made records which are carried out with the first objective to determine the condition of the company experiencing profits or losses.

Keywords : *Accounting, Financial Accounting, Financial Reporting, MSMEs, PSAK, EMKM.*

PENDAHULUAN

Akuntansi umumnya didefinisikan sebagai seni atau ilmu yang berhubungan dengan pencatatan, penyajian, analisis, dan interpretasi data keuangan suatu perusahaan (Chaled & Sarumpaet, 2019). Perusahaan yang menjadi perhatian akuntansi baik itu unit bisnis, keluarga, yayasan, unit pemerintah, atau ekonomi atau sektor apa pun adalah unit sosial

dengan aspek keuangan (Syahierdian, 2021). Akuntansi menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk masyarakat sebagai alat untuk informasi keuangan dan kontrol (Biduri, 2018). Unit sosial berubah dalam aspek organisasi dan keuangan mereka selama periode waktu tertentu, dan dengan ini kebutuhan mereka akan informasi dan kendali juga berubah.

Menelusuri kembali pada pemikiran akuntansi yang pernah dituliskan sejak abad ke-15 hingga abad ke-20 memberikan gambaran yang mendalam betapa sulitnya menata dan mendisiplinkan pembukuan secara sistematis. Perjuangan panjang yang menyita waktu, pikiran dan tenaga individu yang dengan sabar dan tekun merintis jalan bagi generasi selanjutnya nampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah melewati waktu yang panjang, ternyata akuntansi masih belum memiliki landasan konseptual yang sistematis agar sesuai dengan disiplin dengan ilmu lain. Sejarah pemikiran akuntansi penuh dengan cerita kelam yang seringkali menimbulkan rasa frustrasi yang mendalam bagi para individu yang telah mendedikasikan hidupnya untuk perkembangan kemajuan akuntansi

Sebelum tahun 1950, teori akuntansi biasanya dirumuskan dengan mengamati praktik akuntansi para akuntan dan kemudian menjelaskannya. Pendekatan seperti itu memunculkan teori deskriptif atau teori sintaksis. Tahun 1950-an dan 1960-an lebih didominasi oleh teori normatif, dan teori komputasi normatif dan sintaksis diturunkan dari hasil analisis logika. Namun, teori normatif biasanya menekan pembuatan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan akuntan (Budiarto & Murtanto, 1999). Meskipun kontribusi teori deskriptif, teori sintaksis, dan teori normatif dalam perkembangan akuntansi cukup signifikan, namun tampaknya masih banyak kalangan yang tidak puas dengan pendekatan yang digunakan untuk menurunkan teori tersebut.

Standar Akuntansi adalah pernyataan otoritatif tentang bagaimana jenis transaksi dan peristiwa tertentu harus tercermin dalam laporan keuangan perusahaan (Diviana et al., 2020). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi biasanya diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan.

Standar akuntansi diklasifikasikan sebagai aturan dan prinsip (Limijaya, 2017). Prinsip *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* yang dikembangkan oleh *Financial Accounting Standards Board (FASB)* biasanya diberi label sebagai standar yang berbasis aturan. Di sisi lain, *International Accounting Standard (IAS)* dianggap berbasis prinsip (Kustono, 2010).

Cara umum untuk membenarkan perbedaan standar akuntansi antar negara adalah jenis lingkungan peraturan: negara dengan kebiasaan hukum umum dan negara dengan tradisi kode (nama lain : dikotomi hukum *code common law*).

Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan, tahun 1602 - 1799 saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana, pada tahun 1800 - 1942 saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 - 1945 pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan salah satunya harmonisasi pada standar IFRS (*International Financial Accounting Standard*).

Didirikan pada tahun 1957, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan wadah bagi para akuntan Indonesia yang terus mengembangkan standar untuk menyesuaikan diri dengan dunia bisnis dan profesi akuntan serta menjadi anggota IFAC (*International Federation of Accountants*).

IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi Standar Pelaporan Keuangan (PSAK) sejalan dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), dilanjutkan dengan konvergensi dengan standar IFRS. PSAK adalah aturan untuk standar untuk pencatatan, penyusunan, pemrosesan, dan penyajian laporan keuangan sedangkan IFRS merupakan Standar Akuntansi Internasional.

Sebuah momen penting dicatat pada tahun 2012 ketika PSAK berbasis IFRS diluncurkan di Indonesia pada tahun tersebut. Sehubungan dengan pemberlakuan IFRS, terdapat beberapa perubahan di PSAK yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan IFRS.

PSAK-IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum.

Di Indonesia distandarkan pelaporan akuntansi ditandai dengan diterbitkannya standar untuk perusahaan kecil dan menengah dalam International Financial Accounting Standard. Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) agar standar tersebut dapat diterapkan di Indonesia sehingga dapat menjadi pedoman bagi perusahaan kecil dan menengah dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab (Sirait et al., 2021).

Pertumbuhan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) berkembang cukup pesat dalam waktu setahun (Hapsari et al., 2020). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund menyatakan pelaku UMKM di Indonesia terdapat 58,97 juta orang, sementara jumlah penduduk Indonesia yaitu 265 juta jiwa.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dengan lebih baik dan terorganisir (Irawati, 2018). Pesatnya perkembangan pertumbuhan UMKM di Indonesia sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Namun, ada juga masalah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Masalah umum yang dihadapi salah satunya yaitu sulitnya mengukur keberhasilan yang dicapai, hal ini sulit karena UMKM tidak mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan usahanya saat ini karena banyak dari UMKM yang tidak melakukan pencatatan dan menyimpan pelaporan keuangannya serta tidak melakukan pelaporan untuk pembukuan (Anggraeni et al., 2013).

METODE

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer yang diperoleh langsung dari responden melalui tahap wawancara dan kuesioner dengan pertanyaan campuran yaitu terbuka dan tertutup serta dibagi menjadi beberapa bagian. Objek penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang berada di lingkungan Jabodetabek. Usia rata-rata responden adalah 23 tahun dengan berbagai jenis usaha. Total pelaku usaha yang diteliti sebanyak 5 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Responden

No	Nama Usaha	Bidang Usaha
1	Marasoe Id	Fashion
2	Sincerity Bouquet	Handcrap, Florist
3	Kinchi Stuff	Beauty
4	Partner in Legal	Legal Consultant
5	Titik teh	Food and Beverage

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kelima pelaku bisnis pada Tabel 1 didapatkan bahwa belum satupun diantara responden yang pernah mendengar bahkan

menerapkan SAK EMKM. Dalam melakukan pencatatan, responden mengaku tengah mengalami kesulitan terkait metode pencatatan namun banyak terbantu oleh informasi yang diperoleh melalui internet. Lebih dalam lagi, responden yang juga berperan sebagai *owner* ini 60% diantaranya masih mengelola pencatatan sendiri dan belum memenuhi standar SAK EMKM. dapat dilihat kondisi pencatatan yang terjadi di perusahaan responden seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Model Pencatatan Responden

No	Nama Usaha	Metode Pencatatan
1	Marasoe Id	Laba Rugi, Laporan Arus Kas
2	Sincerity Bouquet	Jurnal
3	Kinchi Stuff	Jurnal
4	Partner in Legal	Laporan Arus Kas
5	Titik teh	Laporan Laba Rugi

SAK EMKM menerapkan setidaknya tiga pencatatan yang dilakukan UMKM yakni a) laporan laba rugi; b) laporan posisi keuangan; c) catatan atas laporan keuangan. Realisasi yang terjadi hanya laporan laba rugi yang baru diterapkan bahkan hanya dua dari lima perusahaan milik kelima responden. Dapat diketahui keberadaan SAK EMKM di lingkungan pelaku UMKM khususnya yang berada di umur 23 tahun, generasi Z, masih sangat awam. Akan tetapi, umur tersebut telah memasuki usia paling dominan diantara kalangan umur lain untuk aktif mencari informasi. Hal ini sinyal bahwa keberadaan SAK EMKM perlu dikritisi sehingga kebermanfaatannya sampai kepada target yang dituju.

Keberadaan SAK EMKM yang diharuskan dapat memberikan panduan kepada UMKM nyatanya tidak terealisasi dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kelima responden menyatakan bahwa keberadaan SAK EMKM memang diperlukan. Namun, agar eksistensinya meningkat maka perlu dilakukan pendekatan dengan cara yang lebih mudah digapai oleh UMKM khususnya dari generasi Z. Selain itu, informasi terkait SAK EMKM lebih banyak disinggung oleh *blogger* dari website terpercaya dan informasi yang diberikan hanya sebatas pengenalan. Sedangkan, pihak UMKM membutuhkan contoh penulisan (*template*) yang dapat membantu pelaku usaha membuat laporan keuangan. Seperti yang kebermanfaatannya yang tertera pada SAK EMKM ini.

SIMPULAN

Kesimpulan diambil berkaitan dengan analisa pada kegiatan usaha responden. Didapatkan bahwa pelaku usaha, UMKM, telah melakukan pencatatan yang dilakukan dengan tujuan pertama untuk mengetahui kondisi perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Informasi tersebut dapat tercermin melalui jurnal sederhana yang dilakukan dengan mempertimbangkan modal dan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan diperoleh. Akan tetapi, pelaku usaha yang memiliki pengetahuan dan tim khusus dapat mengolah Laporan Laba Rugi untuk mengetahui lebih detail terkait informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode berjalan. Ketidakmampuan pelaku

usaha dalam merealisasi pencatatan sampai dengan laporan keuangan yang memadai ini karena minimnya informasi terkait SAK EMKM. Terbukti dari jawaban responden yang baru pertama kali mendengar SAK EMKM ketika wawancara berlangsung.

Untuk mendukung keberadaan SAK EMKM ini maka diharapkan IAI sampai dengan pemerintah dapat lebih cermat dan informatif saat melakukan sosialisasi. Mengingat target yang dituju adalah generasi yang umumnya aktif pada lama internet. Sehingga pelaku usaha UMKM dapat mengetahui minimal standar yang harus mereka penuhi. Terlebih terkait model pencatatan apa saja yang diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara *real time*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Budiarto, A., & Murtanto. (1999). Teori Akuntansi: Dari Pendekatan Normatif ke Positif. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 163–182.
- Chaled, S., & Sarumpaet, S. (2019). EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No. 45 PADA ORGANISASI NIRLABA DI BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i1.112>
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>
- Hapsari, P., Hakim, A., Soeaidy, S., & Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10491>
- Irawati, R. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(1), 74–84. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18>
- Kustono, A. S. (2010). Menuju PABU yang Menetapi Tujuan Nasional. *Jeam*, IX(1), 1–11.
- Limijaya, A. (2017). One Financial Reporting Global Language: the Ultimate Goal? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1277–1292. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6731>
- Sirait, A. A. U., Sopanah, A., & Nurhayati, I. D. (2021). Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada penyajian laporan keuangan BUM desa. *National Conference on Accounting & Finance*, 3, 157–172. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art14>
- Syahierdian. (2021). Implementasi Creating Shared Value Pada Pt. Nestle Indonesia. *Skripsi Universitas Brawijaya*, 25, 2013–2015.
- Yuesti, A., N. L. P. S. Dewi dan I. G. A. A. Pramesti. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Issue 25). <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>. Bali